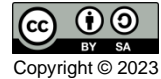


Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 – 2021

Marsianus Telin, Noeke Chrispur Mardiasih, Adi Suprayitno



Marsianus Telin¹, Noeke Chrispur Mardiasih², Adi Suprayitno³; ^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang, ³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Dieng No. 62-64, Klojen, Kota Malang, 65146, Jawa Timur.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2022-25-12

Received in revised form 2023-11-01

Accepted 2023-03-02

Kata kunci:

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal.

Keywords:

Regional Taxes, Regional Retribution, Capital Expenditures.

How to cite item:

Marsianus Telin, Noeke Chrispur Mardiasih, Adi Suprayitno. (2023).

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Terhadap Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 – 2021.

Journal of Regional

Economics Indonesia, 4(1).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah belanja modal dipengaruhi sebagian atau secara simultan oleh pajak daerah dan retribusi daerah. Studi ini berpusat pada ekonomi moneter teritorial (keuangan daerah) dengan menggunakan laporan penerimaan keuangan yang dilihat dari tahun 2011 hingga 2021 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengujian spekulasi terukur f dan t digunakan untuk menguji data sekunder. Peneliti menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah dapat meningkatkan penggunaan belanja modal di Provinsi NTT dan secara mendasar mempengaruhi konsumsi modal daerah. Investigasi ini menemukan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, meskipun retribusi daerah tidak memberikan dampak yang signifikan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah, terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga belanja modal dapat dialokasikan secara efektif.

This study aims to determine whether capital expenditure is partially or simultaneously influenced by regional taxes and regional levies. This study focuses on the territorial monetary economy (regional finance) using reports of financial receipts viewed from 2011 to 2021 in the Province of East Nusa Tenggara (NTT). Speculation testing measured f and t is used to test secondary data. The researcher found that regional taxes and regional levies can increase the use of capital expenditure in NTT Province and fundamentally affect regional capital consumption. This investigation found that regional taxes have a significant effect on capital expenditures, although regional retributions do not have a significant impact. Regional governments are expected to be able to maximize local revenue, especially from regional taxes and regional levies, so that capital expenditure can be allocated effectively.

* Marsianus Telin, Noeke Chrispur Mardiasih, Adi Suprayitno.

© 2023 University of Merdeka Malang All rights reserved.

Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

1. Pendahuluan

Belanja modal merupakan jenis belanja pemerintah yang diperuntukkan dalam pembentukan modal. Pembentukan modal dibutuhkan bagi pemenuhan beragam kebutuhan seperti modal tanah, peralatan mesin, gedung, dan bangunan. Pembentukan modal mempunyai relevansi dengan alokasi dana investasi yang mempunyai karakteristik sebagai kegiatan pendanaan, yaitu pemerintah daerah menerima dana untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dengan manfaat jangka panjang.

Salah satu teknik yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengeluarkan cadangan usaha adalah melalui konsumsi modal. Berbagai kegiatan yang diatur dalam konsumsi modal sudah tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD dapat dikategorikan sebagai instrumen perencanaan yang berfungsi untuk mengalokasikan pengeluaran serta perolehan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Raswita & Abdullah, 2016).

Dalam mengoptimalkan belanja modal, maka dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja APBD. Kinerja APBD diharapkan dapat disumbang secara signifikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berperan dalam meningkatkan belanja modal pemerintah daerah. Salah satu pos yang mampu mempengaruhi kinerja PAD secara signifikan adalah jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

Setiap daerah memiliki basis pajak yang berbeda karena kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Pada daerah dengan kondisi ekonomi yang wajar, pajak bisa jadi cukup tinggi. Namun di daerah tertinggal, pemerintah daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah terbatas. Hal yang sama berlaku untuk retribusi daerah yang berbeda-beda di setiap wilayah.

Kinerja PAD yang disumbang oleh pajak daerah dan retribusi daerah bagi belanja modal sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi daerah. Meski demikian, masih terdapat perdebatan apakah pajak daerah dan retribusi daerah betul-betul mampu berdampak bagi peningkatan belanja modal. Untuk menjawab perdebatan tersebut, penelitian ini mengambil kasus di Provinsi NTT pada periode 2011-2021. Pemilihan NTT sebagai wilayah penelitian

dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pajak daerah dan retribusi daerah di NTT relatif belum mempunyai kinerja yang optimal, padahal belanja modalnya cukup tinggi.

Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: (i) bagaimana sifat pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal di Provinsi NTT dari tahun 2011-2021?; (ii) bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal di Provinsi NTT selama periode tahun 2011-2021?; dan (iii) manakah dari masing-masing variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap belanja modal di Provinsi NTT selama periode tahun 2011-2021. Ketiga pertanyaan tersebut sangat penting diajukan untuk menjawab perdebatan bagaimana sebenarnya pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal.

2. Belanja Modal Pemerintah Daerah

Belanja modal adalah pengeluaran investasi yang dilakukan untuk menambah aktiva tetap atau investasi yang mampu mendatangkan keuntungan dalam konteks pelayanan publik. Gregorius & Sukartono (2009) mendefinisikan belanja modal sebagai belanja yang manfaatnya biasanya melebihi anggaran untuk satu tahun. Pengeluaran ini akan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan anggaran rutin yang peruntukannya bagi biaya operasional dan pemeliharaan.

Penggunaan modal dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi utama, yaitu pembelian hak (pengalihan nama), kekosongan, penimbunan kembali, pemerataan tanah, pemeliharaan properti, penerbitan sertifikat, dan biaya lain terkait dengan perolehan hak milik hingga properti tersebut menjadi siap pakai (Sandy *et al.*, 2015). Belanja modal peralatan dan mesin meliputi inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai, serta pengeluaran dan biaya yang digunakan untuk memperoleh, melengkapi, mengganti, dan menambah kapasitas peralatan dan mesin. Biaya untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan struktur yang meningkatkan kapasitas hingga dapat digunakan secara operasional dimasukkan dalam belanja modal gedung dan konstruksi.

Pengeluaran atau biaya ini digunakan untuk memperoleh, memperluas, atau mengganti bangunan dan struktur. Belanja modal

untuk jalan, jaringan irigasi, dan jaringan infrastruktur lain meliputi biaya perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan jalan dan jaringan irigasi yang meningkatkan kapasitas hingga jalan dan jaringan irigasi siap digunakan (Suparmoko, 2021). Pengeluaran tersebut digunakan untuk kepentingan pelayanan publik atau untuk menambah, mengganti, atau meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan. Pengeluaran modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk menambah, mengganti, atau memperbaiki aset berwujud lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan perolehan tanah, bangunan, jaringan, atau aset berwujud lainnya. Biaya ini termasuk pengeluaran modal untuk sewa, karya seni, barang antik dan barang untuk penyimpanan sejarah, gudang dan instalasi, buku dan jurnal terbuka, dan jalan irigasi.

Belanja modal dapat dioptimalkan melalui perolehan pajak daerah dan retribusi daerah (Kawedar, 2008). Pajak daerah adalah iuran kepada daerah yang diwajibkan oleh undang-undang untuk memenuhi kebutuhan daerah yang peruntukannya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat (Gregorius & Sukartono, 2009). Contoh pajak daerah seperti pajak daerah Tingkat 1 (provinsi), misalnya bea kendaraan bermesin dan kendaraan di air, biaya pindahan kendaraan bermesin, bea masuk bahan bakar kendaraan bermesin dan penilaian pembagian dan penggunaan air tanah dan permukaan air. Pajak daerah Tingkat II (Peraturan/Kota), misalnya pajak hotel dan restoran, reklame, penerangan jalan, hiburan, pengambilan mineral golongan C, dan parkir, Jenis pajak Tingkat II adalah semua bentuk retribusi daerah yang digunakan untuk membayar langsung pelayanan pemerintah daerah. Sementara retribusi daerah adalah pungutan daerah atas jasa atau perizinan tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam penelitian ini, terdapat dua hipotesis yang diajukan, yaitu: (i) hipotesis pertama (H_1), diduga pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal; dan (ii) hipotesis kedua (H_2), diduga pajak daerah berpengaruh dominan terhadap belanja modal.

3. Metodologi

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dari sumber sekunder tahun 2011-2021. Data yang digunakan adalah data belanja modal, pajak daerah, dan retribusi daerah di Provinsi NTT. Penggunaan metode analisis dapat dirinci seagai berikut:

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif mengadopsi model Gijarati (2003) yang digunakan untuk mendeskripsikan setiap variabel sebagai berikut:

$$G = \frac{Bm1 - Bm0}{Bm0} \times 100\%$$

G = tingkat perkembangan dari masing-masing variabel yang dinyatakan 100%

Bm₁ = pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal tahun sekarang

Bm₂ = pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal tahun sebelumnya

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel variabel tak bebas (Nirmala, 2012). Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + B_1X_1 + B_2X_2 + \varepsilon$$

Y = pertumbuhan ekonomi

α = konstanta

B₁ = koefisien X₁

B₂ = koefisien X₂

X₁ = pajak daerah

X₂ = retribusi daerah

ε = *error term* (variabel pengganggu)

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Tes normalitas digunakan untuk mengevaluasi distribusi data dalam set data atau variabel, terlepas dari apakah distribusi data terdistribusi secara normal. Uji Kolmogorov-Smimov (K-S) adalah uji statistik nonparametrik yang digunakan untuk menentukan apakah residual berdistribusi normal atau tidak.

Jika nilai signifikansi (Asymp) lebih besar dari 0,05, maka H_0 dianggap normal, begitu pula sebaliknya. H_0 dihilangkan (tidak bersirkulasi normal) bila Sig) lebih kecil dari 0,05.

2) Uji Multikolinearitas

Tujuan dari Uji Multikolinearitas untuk mengetahui apakah variabel bebas model regresi tidak memiliki korelasi yang kuat. Toleransi, sebagaimana didefinisikan oleh Ghozali (2017), adalah sejauh mana variabilitas variabel independen tertentu tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Asumsi toleransi dan faktor inflasi varians (VIF) adalah apabila Multikolinearitas terjadi ketika VIF lebih besar dari 10 dan nilai toleransi kurang dari 0,10. Multikolinearitas tidak terjadi jika VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 (Widodo, 2017).

3) Uji Autokorelasi

Ghozali (2017) mengatakan bahwa tujuan dari Uji Autokorelasi untuk melihat apakah ada korelasi antara kesalahan periode $t-1$ model regresi linier (sebelumnya) dengan kesalahan residual periode- t . Metode Durbin-Watson dapat digunakan untuk menentukan apakah terdapat autokorelasi selama pengumpulan data. Durbin-Watson menyimpulkan jika $D-W > 4 - dL$ atau $D-W > 4 - dL$, data menunjukkan autokorelasi. Jika tidak, tidak ada autokorelasi antara data. Jika $4 - dUD-W < 4 - dL$ atau $dL - D-W < dU$, tidak dapat ditarik kesimpulan (Sujarweni, 2016).

4) Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa model regresi mengandung varian variabel yang berbeda satu sama lain. Sebaliknya, Homoskedastisitas mengacu pada varians variabel model regresi yang memiliki nilai yang sama (Ghozali, 2017). Uji signifikansi korelasi Rank Spermman untuk mengukur Heteroskedastisitas adalah ketika sig. > maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada analisis jika sig., dan analisis kemudian menyimpulkan bahwa terjadi Heteroskedastisitas.

5) Uji Hipotesis

- a) Uji Simultan atau sering disebut juga dengan Uji F diperuntukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal di Provinsi NTT tahun 2011-2021.

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{n - k - 1}$$

F = F hitung

R^2 = koefisien determinasi

k = jumlah variabel independen

n = jumlah data

Kriteria pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$H_0 = B_1 = B_2 = 0$

$H_a = B_1 \neq B_2 \neq 0$

- b) Uji Parsial digunakan untuk mengetahui bagaimana masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis parsial atau individual diuji dengan uji parsial. Uji t juga digunakan untuk menguji bagaimana belanja modal dipengaruhi oleh pajak daerah dan retribusi daerah dan daerah. Uji t memiliki rumus berikut:

$$t = \frac{B_i}{S_{B_i}}$$

T = nilai uji signifikan parsial

B_i = koefisien regresi parsial

S_{B_i} = standar deviasi

Kriteria pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$H_0 : B_i = 0$

$H_a : B_i \neq 0$

4. Hasil Pembahasan

a. Hasil Deskripsi Masing-Masing Variabel

Dengan rata-rata 54,04 persen, belanja modal berfluktuasi dari tahun ke tahun, dan sifatnya naik turun. Setiap tahun, hasil pertumbuhan belanja modal di Provinsi NTT bervariasi. Pada tahun 2013, belanja modal

meningkat signifikan sebesar 432,48%. Setelah itu, pada tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu -0,73%.

Sementara pajak daerah juga berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan nilai rata-rata sebesar 20,2%. Dari tahun 2011 hingga 2021, perkembangan pajak daerah memberikan dampak positif dan negatif. Pajak daerah mengalami penurunan sebesar -42,63% pada tahun 2012, dan setelah itu mengalami peningkatan sebesar 136,78% pada tahun 2013.

Sedangkan peningkatan retribusi daerah mengalami masa yang menjanjikan dan kurang menjanjikan dari tahun ke tahun dengan nilai rata-rata sebesar 39,61%. Dari tahun ke tahun, hasil retribusi daerah menunjukkan kenaikan dan penurunan. Pajak daerah naik sebesar 120,64% pada tahun 2017, dan setelah itu tahun 2017 mengalami penurunan sebesar -39,96%.

b. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda menghasilkan koefisien regresi pajak daerah (X1) sebesar 0,711 dengan sig. Koefisien regresi retribusi daerah (X2) sebesar 4,653 dengan sig 0,018 0,05 (pengaruh positif). Sama dengan 0,188 0,05 (efek negatif), maka berikut cara perhitungan persamaan regresi:

$$Y = \alpha + B_1X_1 + B_2X_2 + \varepsilon$$

$$Y = 0,711X_1$$

Berdasarkan persamaan, maka dapat ditarik beberapa poin penting sebagai berikut:

- 1) Konstanta = -76.701.325.194 yang mencerminkan belanja modal sebesar -76.701.325.194 dan jika pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) sama dengan nol. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sebesar -76.701.325.194 merupakan hasil dari variabel lain yang tidak dianalisis dan merupakan faktor yang mempengaruhi belanja modal selain pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Koefisien regresi pajak daerah (X1) sebesar 0,711. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja modal akan naik sebesar Rp jika pajak daerah naik sebesar 1 miliar rupiah.
- 3) Koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,930 atau 93% juga diperoleh dari perhitungan regresi linier berganda. Hal ini

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara variabel bebas dan variabel terikat, karena suatu hubungan dianggap kuat bila koefisien korelasi mencapai 100%. Koefisien determinasi (adjusted R Square) yang dihitung dengan menggunakan regresi linier berganda adalah sebesar 0,830 atau 83%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi belanja modal sebesar 83%, sementara variabel lain yang tidak dianalisis mempengaruhi sisanya sebesar 17%.

Dari hasil analisis, maka dapat dibahas hubungan antar variabel sehingga mampu menciptakan temuan penting sebagai berikut:

a. Hubungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi NTT Tahun 2011-2021

Berdasarkan temuan studi, belanja modal mengalami peningkatan antara tahun 2011 dan 2021. Tahun 2012 terjadi perubahan belanja modal yang paling rendah, yaitu -78,35%. Pasalnya, belanja modal untuk fasilitas umum tidak selalu terealisasi sesuai rencana. Dalam kebanyakan kasus, kecerobohan rekanan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak mengakibatkan penyimpangan dari peraturan perundang-undangan belanja modal untuk fasilitas umum. Angka sebesar 432,48% merupakan belanja modal tertinggi pada tahun 2013. Di Provinsi NTT, belanja modal biasanya naik sebesar 54,04% setiap tahunnya. Dengan terus menggali dan mengembangkan sumber-sumber potensi daerah guna meningkatkan alokasi belanja modal, Pemerintah Provinsi NTT diharapkan dapat lebih memaksimalkan penerimaan daerah.

Hasil temuan analisis yang telah dilakukan peneliti mencerminkan bahwa kedua variabel bebas yaitu pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat belanja modal di Provinsi NTT selama periode 2011-2021. Fakta ini dapat menjamin peningkatan belanja modal di Provinsi NTT yang disebabkan karena kedua variabel bebas tersebut berhubungan dengan wilayah yang sama.

b. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi NTT Tahun 2011-2021

Berdasarkan hasil analisis, telah terjadi peningkatan pajak daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021. Tahun 2012 merupakan kinerja

pajak daerah terendah yaitu sebesar -42,63%. Hal ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang kurang termotivasi untuk membayar kembali pajak yang terutang. Selain itu, tahun 2012 banyak terjadi tunggakan pajak dari wajib pajak yang belum diketahui informasinya oleh pemerintah sehingga terjadi pengurangan pajak daerah. Selain itu, pada tahun 2013 pajak daerah tertinggi sebesar 137,68 persen. Sebab, penerimaan pajak daerah sudah terealisasi sejak 2013. Rata-rata pajak daerah per tahun sebesar 20,22%. Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan dan menguntungkan terhadap belanja modal di Provinsi NTT. Sebab, pajak daerah digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur daerah berdasarkan prioritas dan kebutuhan daerah.

Penelitian terhadap perkembangan retribusi daerah antara tahun 2011-2021 menunjukkan adanya penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2011 sebesar -55,27% dengan normal tahunan sebesar 39,61%. Hal ini karena pemerintah provinsi belum mampu menjadikan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang besar dan belum memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar retribusi daerah. Tujuan perbaikan sistem adalah untuk mempermudah identifikasi sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mendorong belanja modal di Provinsi NTT.

Hasil analisis mengungkapkan bahwa retribusi daerah berdampak negatif dan tidak berdampak signifikan terhadap belanja modal di Provinsi NTT. Hal ini karena pemerintah daerah tidak berperan secara signifikan dalam mengidentifikasi potensi sumber pendapatan daerah dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah sangat mempengaruhi (dominan) variabel penggunaan modal di Provinsi NTT tahun 2011-2021. Nilai koefisien relaps terbesar menunjukkan nilai koefisien relaps variabel belanja teritorial bertanda positif, seperti yang ditunjukkan oleh hasil. Berdasarkan perhitungan, variabel pajak daerah memiliki nilai koefisien regresi linier berganda terbesar.

5. Penutup

Hasil analisis menemukan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, meskipun retribusi daerah tidak memberikan dampak yang signifikan. Variabel pajak daerah memiliki pengaruh paling besar terhadap variabel belanja modal karena memiliki nilai koefisien regresi tertinggi dari variabel yang diteliti.

Pemerintah Provinsi NTT diharapkan dapat memaksimalkan upayanya untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga belanja modal dapat dialokasikan secara efektif dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi NTT diharapkan terus menggali sumber PAD dan meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

Penelitian lanjutan sangat dibutuhkan untuk mengkomparasikan hasil sejenis agar benar-benar mampu menguatkan argumentasi dalam melihat bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal. Selain itu juga diharapkan terjadi penambahan variabel independen yang berpotensi mempengaruhi belanja modal yang dapat diimplementasikan pada daerah-daerah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anggoro,. 2017. *Pungutan Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Arum, J. D. N. 2018. *Statistik deskriptif dengan SPSS*.
- Darwanto & Yustikasari. 2007. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Dinata, G. 2008. Analisis kontribusi PAD terhadap belanja daerah dan pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah (studi empiris pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 3, pp. 12-23.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Kemenkeu.go.id.
- Suparmoko, M. 2021. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. OPAC: Perpustakaan Nasional.
- Gregorius & Sukartono. 2009. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah serta analisis flypaper effect kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2006–2008. *Telaah Manajemen*,

Vol. 6, No. 1, pp. 32-50.

Kawedar, W. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sandy, M., Kalangi, J., & Tolosang, K. 2015. Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal (studi pada Kabupaten Bolaang Mongondow periode 2004-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15, No. 01, pp. 34-42.